



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. M. NAFIAH IBNOR
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 401166

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 512.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1305 m2/40 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000
3. Tanah Seluas 1428 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
4. Tanah Seluas 1428 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/226 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
6. Tanah Seluas 862 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 276.500.000

1. MOTOR, SUZUKI AXELO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA Y1602N02LO NYT SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.000.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. 242.504.081**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 616.519.071



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.705.523.152
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.705.523.152

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.